

**KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM
PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KOTA BANJARMASIN PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN**

Septiani Tiolina Tampubolon
NPP. 29.1201

*Asdaf Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan
Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik*

Email: septianitlina@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/ Background (GAP): Disasters that often occur in South Kalimantan, especially the city of Banjarmasin, are floods. The Regional Disaster Management Agency is an institution in charge of dealing with disasters. In the implementation of flood disaster management, Regional Disaster Management Agency has inadequate facilities and infrastructure so that it hinders its implementation, so that the performance of the Banjarmasin City Regional Disaster Management Agency greatly influences flood disaster management efforts. **Purpose :** This study aims to determine the performance of the Regional Disaster Management Agency in flood disaster management in Banjarmasin City. **Method :** The research method used is descriptive qualitative research, where the author observed phenomena or problems that occur in the field. Then in collecting data, the author used data collection techniques namely observation, interviews and documentation. **Result :** The results showed that the performance of the Banjarmasin City Regional Disaster Management Agency was considered to be still not well implemented. This is evidenced that there is no division of tasks from each personnel, no education and training for the community, coordination has not been carried out evenly, lack of understanding from the Regional Disaster Management Agency personnel related to disaster management and inadequate infrastructure. **Conclusion :** The performance of the Banjarmasin City Regional Disaster Management Agency in flood disaster management is still said to be less well implemented due to several inhibiting factors. In dealing with existing obstacles, efforts have been made, among others, to conduct socialization, provide training to the Regional Disaster Management Agency personnel, carry out disaster mitigation and determine recovery activities. In improving the performance of the Regional Disaster Management Agency, it is recommended to increase the fulfillment of facilities and infrastructure, increase the budget and provide training and education to Regional Disaster Management Agency personnel.

Keywords: Performance, Countermeasures, Floods.

ABSTRAK

Permasalahan: Bencana yang sering terjadi di Kalimantan Selatan khususnya Kota Banjarmasin yaitu bencana banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan lembaga yang bertugas

dalam menangani bencana. Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana banjir, BPBD memiliki sarana dan prasarana yang kurang memadai sehingga menghambat dalam pelaksanaannya, sehingga kinerja dari BPBD Kota Banjarmasin sangatlah mempengaruhi dalam upaya penanggulangan bencana banjir. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Banjarmasin. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dimana penulis mengamati fenomena atau permasalahan yang terjadi di lapangan. Kemudian dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. **Hasil:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja BPBD Kota Banjarmasin dinilai masih kurang terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan belum ada pembagian tugas dari masing-masing personil, belum ada dilakukannya pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat, belum dilakukannya koordinasi secara merata, kurangnya pemahaman dari personil BPBD terkait penanggulangan bencana dan sarana prasarana yang kurang memadai. **Kesimpulan:** Kinerja BPBD Kota Banjarmasin dalam penanggulangan bencana banjir masih dikatakan kurang terlaksana dengan baik dikarenakan beberapa faktor penghambatnya. Dalam menangani hambatan yang ada, upaya yang dilakukan antarlain melakukan sosialisasi, memberikan pelatihan kepada personil BPBD, melakukan mitigasi bencana dan penentuan untuk kegiatan pemulihan. Dalam meningkatkan kinerja BPBD disarankan untuk meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana, penambahan anggaran kepada BPBD dan pemberian pelatihan dan pendidikan kepada personil BPBD.

Kata kunci: Kinerja, Penanggulangan, Banjir

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No.24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana menjelaskan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang dapat mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau nonalam maupun faktor manusia sehingga menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Sedangkan bencana hidrometeorologi merupakan sebuah bencana alam yang biasanya terjadi karena adanya fenomena meteorologi seperti gelombang tinggi, hujan lebat, banjir bandang, dan sebagainya. Menurut data BMKG diperkirakan bencana pada awal tahun 2021 akan hampir sama dengan bencana yang terjadi di tahun 2020, dan juga Kepala BMKG memperkirakan bahwa Indonesia akan mengalami puncak musim hujan pada bulan Januari sampai Februari 2021 sebesar 72,5%. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat sebagian besar wilayah Indonesia, yaitu 94% dari 342 zona musim, saat ini telah memasuki puncak musim hujan.

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menangani setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Permasalahan penanggulangan bencana ini sudah diatur dalam undang-undang, mulai dari masa prabencana hingga tanggap darurat maupun setelah bencana. Salah satu isu utama dan menjadi masalah besar dalam penanggulangan bencana berada pada pendataan. kendala utama dalam penanggulangan bencana, yaitu pembagian logistik pada sebuah daerah bencana dan kelancaran arus komunikasi atau sarana prasarana. Maka dari itu, pemerintah harus memberikan perlindungan dalam hal penanggulangan bencana yang terdapat dalam ruang lingkup manajemen bencana yang efektif

dan efisien, khususnya pada penanggulangan bencana banjir. Penanggulangan bencana banjir tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah saja, namun semua pihak harus berperan aktif termasuk masyarakat juga harus turut serta menangani masalah banjir ini.

Berdasarkan kondisi geografis Kalimantan Selatan memiliki iklim tropis yang berada di bagian tenggara pulau Kalimantan dan berkawasan dataran rendah serta memiliki banyak rawa serta sungai. Sampai saat ini masyarakat yang tinggal di pinggiran sungai masih memanfaatkan sungai sebagai alat transportasi dan juga digunakan untuk kehidupan sehari-harinya seperti kegiatan MCK (mandi, cuci, kakus). Bencana banjir adalah bencana yang sering terjadi di Kalimantan Selatan namun dengan skala yang kecil dan tidak membuat kerugian baik dari segi materi maupun korban jiwa dengan indeks yang besar. Oleh karena itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah sangat berperan penting dalam upaya penanggulangan bencana banjir.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Bencana mengakibatkan korban meninggal, rusaknya keadaan sekitar, hancurnya barang kekayaan yang menyebabkan kerugian, dan psikis yang terganggu. Kalimantan Selatan memiliki iklim tropis dan berkawasan dataran rendah, sehingga bencana yang sering terjadi yaitu bencana banjir terutama di Kota Banjarmasin. Pada tahun 2021 Kalimantan Selatan mengalami bencana banjir dengan skala yang sangat besar dan kejadian ini terjadi pertama kalinya dalam kurun waktu 50 tahun terakhir. Bermula dari hujan yang berintensitas tinggi yang terjadi di wilayah provinsi Kalimantan Selatan telah menyebabkan banjir dengan skala yang besar juga diikuti dengan banjir bandang dan tanah longsor di beberapa kabupaten, hujan dengan intensitas tinggi terjadi sejak 9 Januari 2021 mengakibatkan ketinggian air meningkat secara berkala, puncaknya pada tanggal 13 Januari 2021 intensitas hujan mencapai 300 mm/hari.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 19 tahun 2013 tentang penanggulangan bencana pada pasal (9), salah satu upaya untuk menangani masalah banjir ini pemerintah mendirikan badan penanggulangan bencana daerah dan pembentukannya pun dilaksanakan melalui koordinasi dengan BNPB. BPBD Kota Banjarmasin memiliki tugas yaitu memberikan pengarahan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan, memberikan laporan situasi sebulan sekali saat daerah dalam keadaan normal dan setiap saat apabila daerah tersebut sedang terjadi bencana kepada walikota dan juga bertugassebagai penanggung jawab atas penggunaan dana anggaran yang telah diterima dari APBD.

Dalam upaya penanggulangan bencana banjir BPBD Kota Banjarmasin ada faktor yang menjadi penghambat yaitu salah satunya sarana prasarana yang kurang memadai. Banyak dari sarana dan prasarana yang tersedia di BPBD Kota Banjarmasin mengalami kerusakan berat dan sangat terbatasnya sarana dan prasarana yang ada. Sedangkan banjir sering terjadi di sekitar wilayah Banjarmasin yang disebabkan oleh intensitas curah hujan yang tinggi. Akan tetapi ada faktor lain yang menyebabkan banjir yaitu karena lingkungan yang sudah tidak mampu menyerap air saat sedang terjadinya hujan dengan intensitas curah hujan yang ekstrim dikarenakan lahan yang sudah mulai terusik oleh beberapa lah manusia sehingga mengurangikapasitas daya dukung lingkungan untuk menerima atau merespon hujan yang sangat ekstrim tersebut. Oleh karena itu kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin sangat mempengaruhi dalam upaya penanggulangan banjir di Kota Banjarmasin.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks hubungan kinerja anggota maupun dalam penanggulangan bencana. Penelitian Evan Sarli Rakasiwi berjudul *Efektivitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Bandar Lampung* (Evan Sarli Rakasiwi, 2018), menemukan bahwa upaya penanggulangan bencana banjir untuk menghadapi kebutuhan masyarakat yang setiap tahunnya selalu berubah- ubah, sesuai dengan kondisii yang ada, maka dibuatlah sebuah Renstra yang dialkukan setiap 5 tahun sekali. Penelitian M. Afif Salim menemukan bahwa Penanganan banjir paling utama adalah pembiasaan masyarakat dengan berperilaku baik dalam menjaga lingkungan dan pembenahan saluran drainase yang efektif dan efisien (M. Afif Salim, 2018). Penelitian Dwi Nur Ilma Aulia menemukan bahwa Sudah terdapat beberapa perencanaan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai macam Perencanaan atau Perumusan yaitu adanya di lakukannya Musrenbang termasuk membahas penanggulangan bencana banjir adapun perumusan atau perencanaan lain yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Maros mengadakan Program Kampung iklim, mengatasi banjir dua hal yaitu adaptasi dan mitigasi (Dwi Nur Ilma Aulia, 2019). Penelitian Nur Annisa Alhadid menemukan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi bencana yang sudah dikatakan baik dengan indikator keberhasilannya dapat dilihat dari berjalannya tugas dan fungsi BPBD sesuai peraturan yang berlaku yaitu yang dilakukan membuat program penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan indikator pengurangan resiko bencana (PRB), dari program penyelenggaraan. penanggulangan bencana ini mempunyai sasaran dan target yang ingin dicapai dari kinerja yang telah dilakukan serta melakukan koordinasi dengan lembaga terkait dengan penanggulangan bencana dan juga memberikan pendidikan dan pelatihan terhadap personil maupun relawan, dalam penanggulangan bencana karhutla (Nur Annisa Alhadid,2021). Penelitian Desriyani Dakka dkk menemukan bahwa dalam meningkatkan kinerja terhadap pegawai Badan Penggulangan Bencana Daerah Sorong maka perlu memberikan motivasi berupa intensif atau berupa promosi terhadap pegawai untuk bisa naik jabatan berdasarkan pada hasil yang diperoleh dalam pekerjaanya (Desriyani Dakka dkk, 2020).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni pada masa pandemi Covid-19 dimana adanya perubahan dalam penanggulangan bencana pada masa pandemi, teori yang digunakan dalam menganalisis yaitu menggunakan teori kinerja yang berbeda dengan penelitian M. Afif Salim, Dwi Nur Ilma Aulia maupun Nur Annisa Alhadid. Selain itu pengukuran/indikator dalam menilai kinerja instansi pemerintahan yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan teori kinerja menurut Moehariono (2009:82) yaitu dalam mengukur kinerja suatu instansi pemerintahan terdapat 5 indikator antarlain masukan , keluaran, hasil, manfaat, dan dampak.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai bagaimana kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan pendekatan secara induktif, dimana penulis mengamati fenomena atau permasalahan yang terjadi di lapangan. Kemudian dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data menurut Moleong yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yaitu melakukan wawancara dengan 6 informan yang terdiri dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarmasin, Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik, Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Masyarakat Kota Banjarmasin yang terdampak banjir. Sedangkan observasi yang dilakukan penulis yaitu mengamati kegiatan yang dilakukan dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Banjarmasin dan mengamati sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarmasin.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Banjarmasin

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menganalisa dengan menggunakan teori dari Moehariono (2009:82) dengan 5 indikator untuk mengukur kinerja suatu instansi pemerintahan antaralain masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

3.1.1. Masukan

Masukan dalam penelitian ini yakni terjadinya kecukupan sumberdaya manusia dan adanya kebijakan penanganan penanggulangan bencana banjir. Personil BPBD Kota Banjarmasin masih dikatakan kurang dimana hanya memiliki personil sebanyak 20 orang dan itupun dibagi menjadi beberapa kelompok. Hal ini merupakan jauh dari kata cukup karena dengan 20 orang personil tidak akan mampu menanggulangi bencana banjir yang ada di Kota Banjarmasin, dengan titik banjir yang banyak di Kota Banjarmasin maka personil yang ada di BPBD Kota Banjarmasin akan sangat kesulitan dalam menanggulangi banjir yang di Kota Banjarmasin. Selain itu pembagian tugas yang dilakukan di BPBD Kota Banjarmasin belum cukup jelas karena masih ada personil yang tidak mampu melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya.

3.1.2. Keluaran

Keluaran merupakan segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan nonfisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan. Keluaran dalam penulisan ini yaitu hasil dari kinerja Badan penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi banjir di Kota Banjarmasin. Untuk melihat keluaran dari kinerja BPBD Kota Banjarmasin dilihat dari tersedianya sarana dan prasarana kerja BPBD Kota Banjarmasin dalam menanggulangi banjir. BPBD Kota Banjarmasin masih kekurangan sarana dan prasarana kerja dalam menanggulangi banjir

BPBD Kota Banjarmasin masih kekurangan sarana dan prasarana mereka hanya mengandalkan sarana dan prasarana yang ada, sehingga hasil dari kinerja BPBD belum maksimal dan belum bisa dirasakan oleh masyarakat, hal ini menjadi kendala terlaksananya kinerja BPBD Kota Banjarmasin dengan baik. Sarana dan prasarana yang ada di BPBD Kota Banjarmasin salahsatunya Perahu Karet hanya ada 2 unit dan Water Treatment Portable hanya satu unit ini masih sangat minim sementara daerah yang terkena banjir lebih dari jumlah sarana dan prasarana tersebut hal ini sangat berpengaruh kepada kinerja BPBD Kota Banjarmasin dalam menanggulangi banjir tersebut.

Keluaran dari kinerja BPBD juga dapat dilihat dari pelatihan dan pendidikan yang diberikan. BPBD Kota Banjarmasin masih sangat jarang mengadakan pelatihan atau pendidikan kepada masyarakat terkait penanganan banjir di Kota Banjarmasin. Hal ini sangat disayangkan karena pelatihan dan pendidikan juga merupakan solusi yang dinilai cukup baik dalam menanggulangi banjir, karena apabila masyarakat sudah diberi pandangan, pelatihan atau pendidikan maka masyarakat paling tidak sudah bisa membantu BPBD Kota Banjarmasin dalam menanggulangi banjir.

3.1.3. Hasil

Hasil adalah ukuran seberapa jauh setiap produk atau jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Hasil yang dimaksud dalam penulisan ini adalah dampak atau manfaat yang dihasilkan oleh BPBD Kota Banjarmasin dalam menanggulangi banjir yang bisa dirasakan oleh masyarakat Kota Banjarmasin. Keberhasilan kinerja BPBD Kota Banjarmasin bisa dilihat dari bagaimana manfaat yang dihasilkan oleh BPBD Kota Banjarmasin dalam menanggulangi banjir dan ini bisa dilihat dari apakah sudah berkurang atau belum daerah yang terkena banjir di daerah Kota Banjarmasin. BPBD Kota Banjarmasin pada saat kejadian masih belum mampu mengurangi daerah yang terkena banjir secara cepat, harus menunggu dalam beberapa hari baru banjir bisa ditangani. Dengan program kerja dan usaha yang dilakukan BPBD, daerah yang terkena banjir di Banjarmasin akhirnya dapat teratasi walaupun menunggu waktu yang lama dikarenakan baru pertama kalinya Banjarmasin terkena bencana banjir ini. Di beberapa daerah yang terkena banjir sudah ada perbaikan untuk bangunan dan rumah-rumah yang terkena banjir dan saat penulis datang ke lapangan disaat curah hujan sangat tinggi daerah yang terkena banjir sudah sangat berkurang, sehingga penulis menilai bahwa BPBD Kota Banjarmasin lumayan mampu mengurangi daerah yang terkena banjir di Kota Banjarmasin.

Berdasarkan hasil observasi bahwa beberapa masyarakat sudah peduli terhadap banjir walaupun hanya beberapa baik itu masyarakat disekitar sungai ataupun masyarakat yang tinggal jauh dari sungai, karena beberapa masyarakat sudah ada membuat beberapa plang tentang larangan membuang sampah sembarangan. Walaupun masih ada masyarakat membuang sampah kesungai, tetapi sudah mulai berkurang

3.1.4. Manfaat

Manfaat adalah kegunaan suatu keluaran yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses atau dinikmati oleh publik. Manfaat yang dimaksud dalam penelitian yaitu produk/jasa yang bisa dihasilkan dari kinerja BPBD Kota Banjarmasin dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Indikator yang menjadi penilaian manfaat disini yakni ketercapaian hasil kerja dapat dinilai efektif dan efisien. Kinerja BPBD saat terjadi banjir tidak efisien dan efektif karena

kurangnya sarana dan prasarana yang ada dan juga kurangnya pengetahuan anggota BPBD terkait penanggulangan bencana banjir ini. hambatan untuk mencapai hasil kinerja yang efektif dan efisien dibutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung agar saat terjadi banjir, pihak BPBD bisa langsung menangani banjir tersebut tanpa harus menunggu pinjaman sarana dan prasarana dari pihak lain.

3.1.5. Dampak

Dampak adalah ukuran tingkat pengaruh sosial ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian indikator kinerja dalam suatu kegiatan. Impact yang dimaksud dalam penelitian yaitu pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif oleh BPBD Kota Banjarmasin dalam program penanggulangan banjir di Kota Banjarmasin. Untuk melihat hal tersebut dapat dilihat dari tercapainya kesadaran masyarakat akan bahaya banjir. BPBD Kota Banjarmasin sangat mengharapkan adanya kesadaran dari masyarakat Kota Banjarmasin tentang bahayanya banjir sehingga penanggulangan bencana banjir yang dilakukan BPBD Kota Banjarmasin tidak sia-sia. Apabila masyarakat sudah sadar dengan bahaya banjir, maka sifat masyarakat yang sering membuang sampah akan berkurang. Sampai saat ini masih sangat minim terlihat masyarakat yang sangat peduli dengan lingkungannya masing-masing. Masih cukup banyak masyarakat yang belum sadar akan bahaya banjir seperti masih ada terlihat sampah tergenang di sungai. Tidak ada gunanya apabila hanya BPBD yang andil dalam menanggulangi bencana dan masyarakatnya belum peduli akan lingkungan dan tingkat kesadaran akan bahaya banjir masih rendah.

Tabel 3.1

Target dan Realisasi Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Penanggulangan Bencana Banjir 2021-2022

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
1.	Para personil yang siap diturunkan saat terjadinya bencana	100%	99%	Belum Tercapai
2.	Daerah bencana yang bisa ditanggulangi	100%	100%	Tercapai
3.	Bantuan logistik untuk korban yang terkena bencana	100%	100%	Tercapai
4.	Melakukan kegiatan sosialisasi ke 9 (sembilan) kecamatan	100%	98%	Belum Tercapai
5.	Perbaikan dan kelengkapan sarana dan prasarana	100%	98%	Belum Tercapai
6.	Meminimalisir daerah yang terkena banjir	100%	100%	Tercapai
7.	Masyarakat yang peduli akan bencana banjir	100%	99%	Belum Tercapai

Sumber: BPBD Kota Banjarmasin

3.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Banjarmasin

3.2.1. Faktor Pendukung

Ada dua indikator pendukung yang menjadi perhatian dalam kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Banjarmasin yaitu banyaknya sumber daya manusia yang menjadi relawan bencana dan kepedulian manusia terhadap lingkungan Kota Banjarmasin. Penanggulangan bencana banjir di Kota Banjarmasin cukup terkendali akibat banyaknya kelompok masyarakat dan instansi terkait yang saling bahu membahu dalam menangani bencana banjir serta memberi gagasan kepada pemerintah terkait langkah dalam proses pengurangan risiko banjir. Masyarakat Kota Banjarmasin melalui organisasi relawan bencana ataupun kemasyarakatan mencoba mendukung dan membantu pemerintah daerah dalam rangka membantu BPBD dalam menanggulangi bencana banjir. Keterlibatan masyarakat atas dasar prihatin akibat dampak yang ditimbulkan oleh banyaknya masyarakat yang membuang sampah sembarangan dan masih banyaknya pertambangan yang menggali tambang secara berlebihan.

Kepedulian manusia terhadap lingkungan juga menjadi faktor pendukung dalam keberhasilan BPBD Kota Banjarmasin dalam menanggulangi bencana banjir. Kepedulian sosial dari masyarakat Kota Banjarmasin sudah dikatakan cukup baik. Bantuan kemanusiaan juga hadir oleh masyarakat Kota Banjarmasin melalui inisiatif warga Banjarmasin yang tidak terdampak seperti bantuan- bantuan logistik yang diberikan oleh masyarakat untuk masyarakat yang terdampak banjir, otomatis membantu pemerintah dan BPBD dalam hal pendanaan guna pemberian sembako bagi yang terdampak bencana banjir tersebut. Selain itu juga masyarakat saling bergotong royong untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh banjir.

3.2.2. Faktor Penghambat

Faktor yang sangat menjadi perhatian dalam menghambat kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin dalam penanggulangan bencana banjir adalah lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin itu sendiri, karena lembaga ini dikatakan tidak diperhatikan oleh pemerintah Kota Banjarmasin dan mungkin tetap akan berlanjut jika tidak diberi peringatan oleh kejadian bencana banjir besar di Kota Banjarmasin pada tanggal 13 Januari 2021. Kelembagaan yang buruk pasti akan berpengaruh terhadap organisasi tersebut dari segi sumber daya manusia dan sarana prasarana pastinya akan tidak memumpuni untuk melakukan penanggulangan bencana banjir. Oleh karena itu lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin harus melakukan pembaharuan dalam kelembagaannya sendiri agar semua program yang sudah direncanakan akan bisa dijalankan dan mencapai tujuan Kinerja BPBD yang maksimal dalam melakukan pekerjaannya.

3.3. Upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Banjarmasin

3.3.1. Pra Bencana

Upaya pra bencana adalah upaya yang bertujuan untuk menyusun rencana pengenalan, pengkajian bencana dan pencegahan dini. Guna mendukung upaya pra bencana ini, maka BPBD Kota

Banjarmasin melakukan beberapa kegiatan. Yaitu:

1. Penyuluhan tentang penanggulangan bencana
Kegiatan sosialisasi tersebut membahas tentang hal-hal yang harus dilakukan saat terjadi bencana dan memberi peringatan agar masyarakat selalu waspada terhadap bencana banjir yang apabila sewaktu-waktu akan terjadi.
2. Memberikan pelatihan kepada personil BPBD
Pelatihan yang diberikan kepada anggota BPBD yang bertugas di lapangan bertujuan untuk agar terbentuk anggota BPBD yang cepat tanggap akan bencana agar sewaktu di lapangan saat terjadi bencana anggota BPBD sudah siap menghadapi bencana yang datang
3. Melakukan mitigasi bencana
Mitigasi bencana ini dilakukan agar saat terjadi bencana, hal-hal yang tidak diinginkan seperti tingginya jumlah korban jiwa dan terjadinyakerusakan fasilitas yang parah dapat diminimalisir.
4. Membentuk keluarga tangguh bencana dan kampung tangguh bencana
Program ini dibentuk karena bertujuan untuk membentuk masyarakat yang tanggap akan bencana. Program kampung tangguh bencana inidibentuk di seluruh kelurahan karena tidak menutup kemungkinan daerah yang dulunya tidak terkena banjir maka tidak akan terkena banjir.

3.3.2. Tanggap Darurat

Saat terjadi bencana banjir, pihak BPBD beserta pihak lainnya langsung mencari titik daerah tersebut dan kemudian langsung menugaskan pihak yang bertugas untuk turun ke daerah yang terjadi banjir tersebut. Untuk menunjang upaya penanganan tanggap darurat tersebut, pihak BPBD melakukan beberapa kegiatan seperti melakukan survei guna mengetahui daerah yang terjadi bencana agar BPBD beserta pihak lainnya dapat dengan segera menuju ke daerah tersebut, penyediaan kebutuhan pokok korban bencana dan pembuatan posko-posko darurat di setiap daerah yang terkena bencana banjir.

3.3.3. Pasca Bencana

Tahapan pasca bencana terbagi menjadi rehabilitasi dan rekonstruksi. Upaya yang dapat dilakukan dalam tahapan ini, antara lain:

1. Melakukan Perbaikan
Melakukan perbaikan lingkungan seperti jalan-jalan yang rusak akibat lamanya tergenang oleh air, jembatan-jembatan yang putus akibat derasnya arus sungai saat bencana banjir terjadi agar jalur transportasi.
2. Pemulihan pelayanan publik seperti pelayanan dalam bidang pendidikan
Saat terjadi bencana banjir tersebut, sudah dipastikan banyak sekolah yang terkena dampaknya dan membuat para pelajar tidak dapat bersekolah. Faktor inilah yang membuat pemerintah beserta BPBD mengharuskan melakukan perbaikan secepatnya terhadap sekolah yang terkena dampak banjir agar para pelajar dapat dengan segera kembali bersekolah.
3. Kegiatan pemulihan kondisi psikologis

pemerintah beserta BPBD melakukan kegiatan pemulihan psikologis guna mengembalikan kondisi masyarakat menjadi lebih kuat dan memiliki ketangguhan menghadapi masalah yang terjadi sehingga masyarakat tersebut menjadi produktif dan berdaya guna.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan instansi pemerintahan yang bertugas dalam penanggulangan bencana baik dalam tahap pra bencana, tanggap darurat maupun tahap pasca bencana. Selain itu BPBD mempunyai beberapa fungsi, yaitu merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan korban bencanadengan cepat dan tepat dan juga melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan penanggulanhan bencana. Penulis menemukan temuan penting yakni Kinerja BPBD Kota Banjarmasin dalam penanggulangan bencana banjir masih dikatakan kurang terlaksana dengan baik dikarenakan beberapa hambatan. Untuk meminimalisir adanya hambatan tersebut salah satu yang dilakukan adalah membentuk keluarga tangguh dan kampung tangguh bencana di seluruh kelurahan. Berbeda halnya dengan temuan Dwi Nur Ilma Aulia yang menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai macam Perencanaan atau Perumusan yaitu adanya di lakukannya Musrenbang termasuk membahas penanggulangan bencana banjir adapun perumusan atau perencanaan lain yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Maros mengadakan Program Kampung iklim, mengatasi banjir dua hal yaitu adaptasi dan mitigasi (Dwi Nur Ilma Aulia, 2019).

Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarmasin belum dikatakan terlaksana dengan baik. Hal ini adanya faktor penghambat yaitu tidak diperhatikannya lambaga ini oleh Pemerintah Kota Banjarmasin dan kurangnya personil serta sarana dan prasarana yang kurang memadai, layaknya temuan Nur Annisa Alhadid yang menjelaskan dalam penanggulangan bencana BPBD mempunyai 20 orang personil yang turun kelapangan dengan luas wilayah yang cukup luas membuat kinerja BPBD jadi terhambat. Dalam pelaksanaan program kegiatan yang telah dibuat belum semuanya dapat dilaksanakan disemua daerah yang rawan bencana karena keterbatasan anggaran dan juga peralatan dalam penanggulangan bencana (Nur Annisa Alhadid, 2021). Selanjutnya faktor pendukung dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Banjarmasin ialah banyaknya sumber daya manusia yang menjadi relawan bencana dan kepedulian manusia terhadap lingkungan Kota Banjarmasin, berbeda dengan temuan Desriyani dkk yang menjelaskan bahwa faktor pendukungnya yaitu sarana dan prasarana cukup memadai untuk menangani masalah banjir (Desriyani dkk, 2020).

Adanya pengukuran kinerja instansi pemerintahan diharapkan secara jangka panjang yaitu mampu meningkatkan kinerja personil khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam meningkatkan kemampuan personil BPBD dalam upaya penanggulangan bencana banjir, layaknya penelitian Nur Annisa Alhadid yang menemukan kinerja BPBD dalam pelaksanaan penanggulangan bencana melakukan koordinasi dengan lembaga terkait dengan penanggulangan bencana dan juga memberikan pendidikan dan pelatihan terhadap personil maupun relawan, dalam penanggulangan bencana karhutla(Nur Annisa Alhadid, 2021).

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat dalam meningkatkan kinerja Badan Penanggulang Bencana Daerah Kota Banjarmasin yakni tidak diperhatikannya BPBD oleh Pemerintah Kota Banjarmasin.

Kelembagaan yang buruk pasti akan berpengaruh terhadap organisasi tersebut dari segi sumber daya manusia dan sarana prasarana pastinya akan tidak memumpuni untuk melakukan penanggulangan bencana banjir.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa kinerja BPBD Kota Banjarmasin dalam penanggulangan bencana banjir masih dikatakan kurang terlaksana dengan baik. Hal tersebut berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan yaitu adanya beberapa hambatan dalam menunjang proses penanggulangan bencana banjir diantaranya kurangnya personil, sarana dan prasarana yang kurang memadai, tidak diperhatikannya oleh Pemerintah Daerah, dan kurangnya pelatihan dan pendidikan bagi personil BPBD. Dalam menangani hambatan yang ada, upaya yang dilakukan antaralain melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat, memberikan pelatihan dan pendidikan kepada personil BPBD, melakukan mitigasi bencana untuk meminimalisir terjadinya bencana banjir dan penentuan untuk kegiatan pemulihan. Guna meningkatkan kinerja BPBD disarankan untuk meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana, penambahan anggaran kepada BPBD dan pemberian pelatihan dan pendidikan kepada personil BPBD untuk meningkatkan kemampuan dalam penanggulangan bencana khususnya bencana banjir.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu. Waktu yang diperlukan penulis untuk melakukan penelitian kurang karena penulis harus menggali informasi lebih dalam dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah terutama pada saat kegiatan terjadinya tanggap darurat bencana.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan bencana banjir untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih terutama kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu saat pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Moehariono. 2009. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Bogor:Ghalia Indonesia
- Moelong, L. J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
- Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencana
- Rakasiwi, E. S. 2018. "*Efektivitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Bandar Lampung*" Skripsi. Universitas Lampung
- Salim, M. A. 2018. "*Penanganan Banjir dan Rob di Wilayah Pekalongan*" Skripsi. Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Aulia, D. N. I. 2019. “*Strategi Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Bencana Banjir Di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros.*” Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar

Alhadid, N. A 2021. “*Analisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau.*” Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56007558>

